

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang perannya tidak dapat diremehkan dalam pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan data realisasi APBN tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau setara 89,4 persen dari target yang ditetapkan. Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp594 triliun, atau lebih dari separuh total penerimaan pajak secara keseluruhan. Besarnya proporsi ini menegaskan betapa sentralnya PPh sebagai instrumen fiskal sekaligus memperjelas mengapa pemerintah terus berupaya memaksimalkannya demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional (Hartono, 2024).

Di tengah ambisi fiskal tersebut, kepatuhan wajib pajak menjadi variabel penentu yang tidak bisa diabaikan. Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self assessment, yang secara esensial menyerahkan tanggung jawab penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak kepada wajib pajak itu sendiri. Konsekuensinya, integritas moral dan pemahaman regulasi menjadi prasyarat mutlak agar sistem ini dapat berjalan efektif (Diamastuti, 2026).

Dalam ekosistem penerimaan pajak, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis sekaligus paradoksal. Secara makro, UMKM merupakan pilar ekonomi yang tidak tergantikan: pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia tercatat mencapai 65,4 juta unit usaha, menyerap tenaga kerja dalam skala masif, dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Namun secara fiskal, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih jauh dari mencerminkan potensi riilnya sebuah kesenjangan yang menandakan bahwa kepatuhan pajak di sektor ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM dipicu oleh kompleksitas faktor yang saling berkelindan. Fuadi dan Yenny (2023) mengidentifikasi dua kelompok faktor: internal, yang bersumber dari karakteristik dan sikap individu wajib pajak, dan eksternal, yang berkaitan dengan regulasi, layanan, serta lingkungan sosial. Dari sisi internal, keterbatasan pengetahuan perpajakan menjadi hambatan paling nyata, terutama di kalangan UMKM berskala kecil yang umumnya tidak memiliki sumber daya manusia khusus di bidang akuntansi atau perpajakan (Yusuf, 2024). Andriani dan Herianti (2026) menambahkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung berkorelasi dengan kemampuan memahami regulasi perpajakan secara lebih mendalam, menjadikan intervensi pelatihan sebagai kebutuhan yang mendesak.

Atas dasar itulah, penelitian ini dirancang untuk menginvestigasi pengaruh tiga variabel pelatihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di wilayah BSD. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan judul: “Pengaruh Pelatihan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Wilayah Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelatihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Wilayah Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Wilayah Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM di Wilayah Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui secara parsial pengaruh pelatihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan.
2. Menganalisis dan mengetahui secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan.
3. Menganalisis dan mengetahui secara parsial pengaruh tingkat pendidikan pelaku UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan.

4. Menganalisis dan mengetahui secara simultan pengaruh pelatihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis :

- a) Pengembangan Ilmu Akuntansi Perpajakan: Memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur dan referensi ilmiah mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak sektor UMKM.
- b) Penguatan Attribution Theory dan Theory of Planned Behavior: Menjadi bukti empiris pendukung bagaimana faktor internal (kesadaran, pendidikan) dan faktor eksternal (pelatihan pajak) membentuk perilaku patuh wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis :

- a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) / KPP Pratama:

Sebagai bahan evaluasi dan masukan strategis dalam merancang program Edukasi Perpajakan Terpadu dan Business Development Services (BDS). Data terkini menunjukkan bahwa meskipun rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan nasional berada di kisaran 83%–88%, kepatuhan sektoral UMKM secara substansial masih menyisakan tantangan, terutama pasca penyesuaian regulasi batas peredaran bruto tidak kena pajak (hingga Rp500 juta) dan tarif PPh Final 0,5%. Hasil

penelitian ini dapat membantu KPP menentukan pendekatan edukasi yang lebih segmented berdasarkan profil pendidikan pelaku usaha.

b) Bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan:

Sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembinaan UMKM di kawasan strategis seperti BSD. Dengan tingginya laju pertumbuhan UMKM di Tangerang Selatan, sinergi antara pelatihan manajemen bisnis dan literasi perpajakan dapat meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan daerah dan nasional.

c) Bagi Pelaku UMKM di Wilayah BSD:

Memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya melatih literasi perpajakan serta mengelola kewajiban perpajakan secara tertib demi keberlanjutan dan legalitas usaha di masa depan.

d) Bagi Penelitian Selanjutnya: Dapat dijadikan referensi, bahan pembandingan, serta acuan untuk mengembangkan variabel pendukung lainnya seperti digitalisasi perpajakan, pemanfaatan insentif pajak, atau sanksi perpajakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini, penyusunan skripsi dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan penulisan yang terstruktur sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai latar belakang dan konteks penelitian. Bab ini terdiri dari sub-bab:

- e) 1.1 Latar Belakang: Menguraikan fenomena kepatuhan pajak UMKM di wilayah BSD, data pendukung, serta pentingnya variabel pelatihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan.
- f) 1.2 Rumusan Masalah: Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian mengenai pengaruh parsial dan simultan dari variabel independen terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- g) 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian: Menjelaskan target akademis serta manfaat praktis dan teoritis yang ingin dicapai dari hasil penelitian.
- h) 1.4 Sistematika Penulisan: Menguraikan struktur dan ringkasan isi dari setiap bab dalam penulisan skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori dan acuan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Bab ini mencakup:

- a) 2.1 Landasan Teori: Menguraikan teori-teori relevan (Attribution Theory, Theory of Planned Behavior, serta regulasi perpajakan) yang mendasari variabel pelatihan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan kepatuhan pajak UMKM.
- b) 2.2 Kerangka Pemikiran: Menggambarkan hubungan konseptual antara variabel pelatihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

- c) 2.3 Hipotesis: Menyusun dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan prosedur dan metode teknis yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Bab ini terdiri dari:

- a) 3.1 Definisi Operasional Variabel: Menjelaskan variabel-variabel penelitian beserta indikator dan skala pengukurannya.
- b) 3.2 Populasi dan Sampel: Menentukan batasan populasi pelaku UMKM di wilayah BSD serta teknik kriteria dan jumlah pengambilan sampel.
- c) 3.3 Jenis dan Sumber Data: Menguraikan data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner responden.
- d) 3.4 Metode Pengumpulan Data: Menjelaskan teknik dan prosedur penyebaran kuesioner kepada para pelaku UMKM.
- e) 3.5 Metode Analisis: Menguraikan tahapan pengolahan data, meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, hingga pengujian hipotesis (Uji t, Uji F, dan R²).

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan olahan data statistik beserta analisis temuan lapangan.

Bab ini mencakup:

- a) 4.1 Deskripsi Objek Penelitian: Memberikan gambaran umum kondisi UMKM di wilayah Bumi Serpong Damai (BSD) serta profil responden.
- b) 4.2 Analisis Data: Menyajikan hasil pengujian statistik secara sistematis sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.
- c) 4.3 Interpretasi Hasil: Menganalisis dan membahas makna dari hasil pengujian statistik dalam hubungannya dengan teori dan penelitian terdahulu.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memberikan simpulan dan rekomendasi. Bab ini terdiri dari:

- a) 5.1 Kesimpulan: Menyajikan jawaban ringkas dan padat atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian.
- b) 5.2 Keterbatasan: Menjelaskan kelemahan atau kendala teknis yang dihadapi selama proses penelitian dilakukan.
- c) 5.3 Saran: Memberikan masukan konstruktif bagi Direktorat Jenderal Pajak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pelaku UMKM BSD, serta peneliti selanjutnya.